



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

STRATEGI DAERAH DAN RENCANA AKSI PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2010-2015

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dipandang perlu menyusun Strategi Daerah dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Kabupaten Bone Bolango;

1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Daerah dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010-2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN II :	
ASISTEN I :	
INSPEKTUR :	
KABAG HUKUM :	

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.;

Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI DAERAH DAN RENCANA AKSI PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2010-2015

Pasal 1

Strategi Daerah dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Strada-PK) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010-2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Komitmen melaksanakan Strategi Daerah dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Strada-PK) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010-2015 dituangkan dalam Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Pelaksanaan dan kegiatan Strategi Daerah dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Strada-PK) Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas strategi :

- a. Efektivitas kebijakan dan kelembagaan dalam rangka pencegahan korupsi.
- b. Transparansi administrasi publik melalui kapasitas pengawasan kelembagaan, efektivitas kewajiban pelaporan publik, serta akses publik untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan administrasi publik.

- c. Percepatan reformasi manajemen perencanaan dan keuangan daerah serta pengadaan barang/jasa publik
- d. Efektivitas reformasi birokrasi sektor publik di bidang kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur
- e. Penguatan komitmen anti korupsi

(2) Matriks Strategi Daerah dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Strada-PK) Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN III :	
ASISTEN II :	
INSPEKTUR :	
KABAG HUKUM :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 8 Desember 2010

Plt. BUPATI BONE BOLANGO

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 8 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

ANIS NAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2010 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 16 TAHUN 2010
TANGGAL : 8 Desember 2010

**STRATEGI DAERAH DAN RENCANA AKSI PEMBERANTASAN KORUPSI
(STRADA-PK)**

KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2010-2015

I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tindak pidana yang mempunyai akibat yang sangat luar biasa. Program-program pemerintahan dan pembangunan menjadi tidak mencapai sasaran akibat terjadinya korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Untuk memberantas korupsi perlu dilakukan langkah-langkah tersistem, tersinergis, terus-menerus, melibatkan seluruh komponen bangsa dan tuntas.

Melihat kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyusun Strategi Daerah dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Strada-PK) Tahun 2010-2015 dengan visi mewujudkan Bone Bolango bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Visi ini selanjutnya dituangkan dalam misi-misi sebagai berikut:

1. Membangun dan menetapkan sistem, prosedur, mekanisme dan kapasitas pencegahan korupsi yang terpadu.
2. Membangun dan melaksanakan kerjasama dalam pencegahan korupsi secara efektif.
3. Mengembangkan sistem pelaporan kinerja implementasi Strategi Daerah dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Strada-PK) yang transparan dan terkonsolidasi.

Penjabaran visi dan misi Strategi Daerah dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Strada-PK) 2010 – 2015 diimplementasikan dalam strategi sebagai berikut :

1. Efektivitas kebijakan dan kelembagaan dalam rangka pencegahan korupsi
2. Transparansi administrasi publik melalui kapasitas pengawasan kelembagaan, efektivitas kewajiban pelaporan publik, serta akses publik untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan administrasi publik
3. Percepatan reformasi manajemen perencanaan dan keuangan daerah serta pengadaan barang/jasa publik
4. Efektivitas reformasi birokrasi sektor publik di bidang kelembagaan dan sdm aparatur
5. Penguatan komitmen anti korupsi

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 16 TAHUN 2010
TANGGAL : 8 Desember 2010

PAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pada Kabupaten Bone Bolango dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan tindak criminal lainnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di lingkungan
.
3. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, saya berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, professional dan akuntabel dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik bagi kemajuan Kabupaten Bone Bolango
4. Bersedia untuk dievaluasi setiap saat.
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui
BUPATI BONE BOLANGO

NAMA JELAS

KEPALA

NAMA JELAS

Plt.BUPATI BONE BOLANGO

HAMIM POU

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
 NOMOR : 16 TAHUN 2010
 TANGGAL : 8 Desember 2010

MATRIKS STRATEGI DAERAH DAN RENCANA AKSI PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2010-2015

Isue/ Strategi Daerah	Rencana Aksi	Indikator keluaran	Indikator hasil	Waktu pelaksanaan					pelaksana
				2011	2012	2013	2014	2015	
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN KORUPSI									
Penyempurnaan sistem pelayanan publik	Memperbaiki mekanisme perizinan usaha di bidang investasi dan penanaman modal	Mekanisme perizinan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau	<ul style="list-style-type: none">- Masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar- Biaya untuk menjalankan usaha di Bone Bolango dapat ditekan sehingga menarik investasi dan kompetitif bagi investor						SKPD terkait sesuai bidang investasi
	Memantapkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Dukungan kebijakan, anggaran dan sarana prasarana penerapan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.	Terciptanya sistem pelayanan terpadu satu pintu yang kondusif bagi iklim investasi.						Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
	Memperbaiki mekanisme perizinan dan pelayanan di bidang kependudukan	Mekanisme perizinan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau	<ul style="list-style-type: none">- Masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar						Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Isue/ Strategi Daerah	Rencana Aksi	Indikator keluaran	Indikator hasil	Waktu pelaksanaan					pelaksana .
				2011	2012	2013	2014	2015	
			<ul style="list-style-type: none"> - Biaya untuk menjalankan usaha di Bone Bolango dapat ditekan sehingga menarik investasi dan kompetitif bagi investor 						
	Memperbaiki mekanisme perizinan dan pelayanan di bidang lingkungan hidup	Mekanisme perizinan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar - Biaya untuk menjalankan usaha di Bone Bolango dapat ditekan sehingga menarik investasi dan kompetitif bagi investor 						Badan Lingkungan Hidup
	Memperbaiki mekanisme perizinan dan pelayanan di bidang pertanian	Mekanisme perizinan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar - Biaya untuk menjalankan usaha di Bone Bolango dapat ditekan sehingga menarik investasi dan kompetitif bagi investor 						Bagian Pemerintahan Setda
	Memperbaiki mekanisme perizinan dan pelayanan di bidang energy, sumberdaya dan mineral	Mekanisme perizinan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar 						Dinas Kehutanan dan Pertambangan

Isue/ Strategi Daerah	Rencana Aksi	Indikator keluaran	Indikator hasil	Waktu pelaksanaan					Pelaksana
				2011	2012	2013	2014	2015	
	Memperbaiki mekanisme perizinan dan pelayanan di bidang pendidikan	Mekanisme perizinan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar - Biaya untuk menjalankan usaha di Bone Bolango dapat ditekan sehingga menarik investasi dan kompetitif bagi investor 						Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	Memperbaiki mekanisme perizinan dan pelayanan di bidang keagamaan dan adat istiadat	Mekanisme perizinan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar - Biaya untuk menjalankan usaha di Bone Bolango dapat ditekan sehingga menarik investasi dan kompetitif bagi investor 						Bagian Pemerintahan Setda
	Memperbaiki mekanisme perizinan dan pelayanan di bidang ketenaga kerjaan	Mekanisme perizinan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar - Biaya untuk menjalankan usaha di Bone Bolango dapat ditekan sehingga menarik investasi dan kompetitif bagi investor 						Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Isue/ Strategi Daerah	Rencana Aksi	Indikator keluaran	Indikator hasil	Waktu pelaksanaan					pelaksana
				2011	2012	2013	2014	2015	
	Memperbaiki mekanisme perizinan dan pelayanan di bidang perhubungan dan komunikasi	Mekanisme perizinan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar - Biaya untuk menjalankan usaha di Bone Bolango dapat ditekan sehingga menarik investasi dan kompetitif bagi investor 						Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi
	Memperbaiki mekanisme perizinan dan pelayanan di bidang perikanan	Mekanisme perizinan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar - Biaya untuk menjalankan usaha di Bone Bolango dapat ditekan sehingga menarik investasi dan kompetitif bagi investor 						Dinas Kelautan dan Perikanan
	Memperbaiki mekanisme perizinan dan pelayanan di bidang pekerjaan umum	Mekanisme perizinan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar - Biaya untuk menjalankan usaha di Bone Bolango dapat ditekan sehingga menarik investasi dan kompetitif bagi investor 						Dinas Pekerjaan Umum

Isue/ Strategi Daerah	Rencana Aksi	Indikator keluaran	Indikator hasil	Waktu pelaksanaan				Pelaksana
				2011	2012	2013	2014	2015
	Melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap SKPD yang melaksanakan pelayanan publik	Laporan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh SKPD	SKPD memberikan pelayanan publik secara prima					Inspektorat Daerah
Peningkatan kinerja layanan kepengerintahan	Menerapkan pakta integritas bagi para pejabat SKPD	Pakta Integritas pejabat SKPD	Meningkatkan akuntabilitas kinerja					Inspektorat Daerah
	Menerapkan reward and punishment dalam pemberian pelayanan publik	Penerapan sanksi dan pemberian penghargaan dalam pelayanan publik	Peningkatan pelayanan publik di berbagai bidang yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.					Badan Kepegawaian & Diklat Daerah
	Menerapkan standar pelayanan minimal dan sistem penilaian kinerja	Penerapan pedoman standar pelayanan minimal	Sistem pelayanan publik yang berbasis kinerja, lebih transparan dan akuntabel.					Seluruh SKPD
	Menyempurnakan implementasi sistem akuntabilitas kinerja	Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Peningkatan kualitas pelaporan pemerintah daerah					Seluruh SKPD
	Internalisasi dan aplikasi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik	Persaman persepsi tata pemerintahan yang baik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik					Seluruh SKPD
	Internalisasi dan aplikasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam manajemen BLUD dan BUMD	Persaman persepsi tata pemerintahan yang baik	Terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik					BLUD dan BUMD
	Perbaikan manajemen kinerja (termasuk pembuatan SOP) di SKPD	Standar Operasional Procedure	Penyelenggaraan pemerintahan memiliki mekanisme yang jelas					Seluruh SKPD
TRANSPARANSI ADMINISTRASI PUBLIK MELALUI KAPASITAS PENGAWASAN KELEMBAGAAN, EFEKTIVITAS KEWAJIBAN PELAPORAN PUBLIK, SERTA AKSES PUBLIK UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PUBLIK								
Peningkatan pengawasan atas pelayanan kepengintahan, efektivitas pelaporan dan akses publik terhadap informasi penanganan yang dilakukan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi penanganan pengaduan yang telah dilaporkan	Aparat memberikan informasi secara transparan mengenai perkembangan penanganan pengaduan masyarakat	Kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi laporan yang diberikan.					Inspektorat Daerah


Isue/Strategi Daerah	Rencana Aksi	Indikator keluaran	Indikator hasil	Waktu pelaksanaan					pelaksana
				2011	2012	2013	2014	2015	
	Meningkatkan kemampuan APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah)	APIP yang mampu melakukan pengawasan atas pelayanan pemerintahan	Meningkatnya kemampuan APIP dalam pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi						
	Meningkatkan pelayanan pengaduan (<i>public complaint</i>) warga masyarakat	Laporan penanganan pengaduan masyarakat	Pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah semakin meningkat						
	Memperbaiki sistem pelaporan, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara Negara	Sistem pelaporan yang lebih transparan	Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara						
	Meningkatkan kapasitas Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi	Peningkatan kinerja MP-TGR	Penyelamatan kerugian keuangan Negara/daerah.						
	Melakukan penyusunan peraturan yang berhubungan dengan pengawasan dan pemeriksaan internal	Peraturan Bupati tentang Pengawasan Internal	Pengawasan internal menjadi pendeteksi awal terjadinya tindak pidana korupsi						
PERCEPATAN REFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DAERAH SERTA PENGADAAN BARANG/JASA PUBLIK									
Penyempurnaan manajemen perencanaan pembangunan daerah	Melaksanakan restrukturisasi program dan kegiatan SKPD	Tersusunnya program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja sesuai tupoksi masing-masing	Efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran						
Penyempurnaan manajemen keuangan daerah	Melaksanaan manajemen keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen keuangan daerah	Tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian						
Penyempurnaan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah termasuk memperkuat mekanisme pengawasan	Menerapkan sistem E-procurement	Konsep e-procurement	Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif dan efisien dengan prinsip persaingan yang transparan, terbuka, akuntabel dan sehat serta berkeadilan						
Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Penyusunan laporan Keuangan oleh seluruh SKPD selaku entitas keuangan	Laporan Keuangan SKPD	Tertib manajemen keuangan daerah sejak dari SKPD hingga ke Laporan Pemda						

Isue/ Strategi Daerah	Rencana Aksi	Indikator keluaran	Indikator hasil	Waktu pelaksanaan					pelaksana *
				2011	2012	2013	2014	2015	
EFEKTIVITAS REFORMASI BIROKRASI SEKTOR PUBLIK DI BIDANG KELEMBAGAAN DAN SDM APARATUR									
Implementasi Reformasi Birokrasi, yang terdiri dari: Reformasi Kelembagaan, bisnis proses dan manajemen SDM	Menata ulang struktur Organisasi Perangkat Daerah	Organisasi perangkat daerah yang ramping, efektif dan efisien	Terwujudnya visi dan misi Daerah						SKPD
PENGUATAN KOMITMEN ANTI KORUPSI									
Konsolidasi dan kolaborasi antara sektor publik, legislatif, yudikatif, swasta, organisasi kemasyarakatan dan para pihak terkait lainnya untuk bersamasama melaksanakan Strategi Daerah Pemberantasan Korupsi serta kormonev yang efektif, partisipatif, efektif dan efisien dalam melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi	Mempertegas komitmen di antara lembaga untuk melaksanakan rencana aksi pemberantasan korupsi dan kormonev pemberantasan korupsi	Pelaksanaan Strategi seluruh stakeholders	Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi di berbagai sektor yang didukung oleh komitmen bersama.						Seluruh stakeholders
Penyusunan mekanisme kampanye terpadu pencegahan korupsi yang melibatkan seluruh stakeholders yang disertai dengan proses pembelajaran anti korupsi	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kampanye gerakan anti korupsi	Penyuluhan-penyuluhan pencegahan korupsi	Masyarakat menyadari akan bahaya korupsi bagi kehidupan bangsa dan Negara.						Inspektorat Daerah Organisasi Bagian Hukum dan Organisasi

Isue/ Strategi Daerah	Rencana Aksi	Indikator keluaran	Indikator hasil	Waktu pelaksanaan					pelaksana*
				2011	2012	2013	2014	2015	
Pelibatan Partai Politik dalam rangka Pemberantasan Korupsi	Pembentukan kaukus anti korupsi di DPRD	Terbentuknya kaukus anti korupsi di DPRD	Meningkatnya kesadaran anti korupsi di DPRD						
Melakukan penyusunan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan etika pemerintahan dan integritas PNS	Menyusun ketentuan mengenai etika berperilaku bagi PNS	Tersusunnya Peraturan Bupati yang mengatur kode etik berperilaku bagi PNS	Terciptanya PNS yang berintegritas dan beretika						

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN II	:
ASISTEN I	:
INSPEKTUR	:
KABAG HUKUM	:

Pit.BUPATI BONE BOLANGO



HAMIM POU